

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG MELALUI MODUS
PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN *ILLEGAL*
DI KOTA TANJUNGPINANG**

Oleh

**Deric Ninelee Oktapi
NIM. 2105040059**

Abstrak

Tindak pidana perdagangan orang melalui modus penempatan pekerja migran ilegal masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, khususnya di Kota Tanjungpinang sebagai wilayah perbatasan yang rentan dimanfaatkan sebagai jalur transit menuju negara tetangga. Kondisi tersebut meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap praktik perekrutan ilegal yang berujung pada eksploitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang melalui modus penempatan pekerja migran ilegal di Kota Tanjungpinang serta menganalisis modus operandi yang digunakan oleh pelaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan dengan melibatkan koordinasi antarlembaga. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena terkendala karakteristik wilayah perbatasan, sulitnya mengungkap jaringan pelaku, keterbatasan alat bukti, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Modus operandi dilakukan melalui perekrutan dengan memanfaatkan kondisi ekonomi korban, penggunaan media sosial dan perantara tidak resmi, pemalsuan dokumen, serta pemberangkatan secara nonprosedural yang berujung pada eksploitasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum perlu ditingkatkan melalui penguatan koordinasi antarlembaga, pengawasan wilayah perbatasan, dan upaya pencegahan yang berkelanjutan.

Kata kunci: penegakan hukum; tindak pidana perdagangan orang; pekerja migran ilegal; Kota Tanjungpinang.

**LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIME OF HUMAN TRAFFICKING
THROUGH THE ILLEGAL PLACEMENT OF MIGRANT WORKERS IN
TANJUNGPINANG CITY**

By

**Deric Ninelee Oktapi
NIM. 2105040059**

Abstract

Human trafficking through the illegal placement of migrant workers remains a serious issue in Indonesia, particularly in Tanjungpinang City, a border area vulnerable to being used as a transit route to neighboring countries. This situation increases public vulnerability to illegal recruitment practices that ultimately lead to exploitation. This study aims to analyze law enforcement against the crime of human trafficking through the illegal placement of migrant workers in Tanjungpinang City and to examine the modus operandi employed by the perpetrators. This research employed an empirical legal research method using a qualitative approach. Data were collected through interviews, literature studies, and documentation, and were analyzed using descriptive qualitative methods. The findings indicate that law enforcement has been carried out in accordance with Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Criminal Act of Human Trafficking through the stages of investigation, inquiry, prosecution, and trial, involving coordination among relevant institutions. However, its implementation has not been fully effective due to challenges arising from the characteristics of border areas, difficulties in uncovering organized criminal networks, limited evidence, and low public awareness regarding legal migrant worker placement procedures. The perpetrators employed various modus operandi, including exploiting victims' economic conditions, using social media and unauthorized intermediaries, falsifying documents, and facilitating non-procedural departures that resulted in exploitation. This study concludes that the effectiveness of law enforcement should be strengthened through enhanced inter-agency coordination, improved border supervision, and sustainable preventive measures.

Keywords: *law enforcement; human trafficking; illegal migrant workers; Tanjungpinang City.*